BAB III

**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP
PEREDARAN PRODUK MAKANAN IMPOR
TANPA LABEL BAHASA INDONESIA
DI PROVINSI JAMBI**

A. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Makanan Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia di Provinsi Jambi

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari di dalam masyarakat sangatlah penting dan menjadi hal yang paling utama. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sering sekali menggunakan makanan yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Perkembangan zaman yang modern membuat semakin pesatnya pelaku usaha untuk membuat suatu produk makanan yang banyak diminati dan dicari oleh konsumen. Kegiatan impor dan ekspor antar negara satu sama lain lazim terjadi dikarenakan setiap negara mempunyai kekurangan dan kelebihan terkait sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, kegiatan impor dan ekspor dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara yang belum mampu dipenuhi oleh negaranya.

Setiap produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu mengenai kewajiban pencantuman label bahasa Indonesia pada produk impor makanan sebelum diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kewajiban pelaku usaha salah satunya adalah mencantumkan atau memberikan informasi secara lengkap, jujur dan tidak menyesatkan konsumen, terdapat pengaturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi

secara lengkap, jujur dan tidak menyesatkan konsumen yaitu tertuang di dalam Pasal 8 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa: tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Bedasarkan data yang diperoleh oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jambi pada tahun 2020 hingga tahun 2023 terdapat sebanyak 1.988 jumlah produk makanan impor tanpa label bahasa Indonesia di Provinsi Jambi.

NO	TAHUN	JUMLAH PRODUK IMPOR TANPA LABEL BAHASA INDONESIA
1	2020	432 Produk
2	2021	335 Produk
3	2022	558 Produk
4	2023	663 Produk

Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi

Berikut hasil wawancara dengan informan dari dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi Kepala Bagian Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian ibu Ana, menurut keterangan informan dinas perindustrian dan perdagangan untuk melakukan razia produk makanan impor tanpa label dilakukan bersama badan pengawasan obat dan makanan, kegiatan razia tersebut dilakukan saat ada aduan dari masyarakat dan mendekati hari hari besar seperti saat mendekati lebaran idul fitri dan natal.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara Kepala Bagian Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian Dinas

Dalam teori wewenang menjelaskan bahwa wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam merazia produk tanpa label Bahasa Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang Peraturan ini secara spesifik mengatur kewajiban produsen dan distributor untuk mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia pada produk yang dipasarkan di Indonesia. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki wewenang dalam pengawasan dan penegakan aturan ini, termasuk melalui kegiatan razia. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan diberi wewenang melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran, termasuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan memenuhi ketentuan pencantuman label berbahasa Indonesia. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhak

melakukan inspeksi, razia, dan pengawasan terhadap produk-produk di pasaran yang tidak memenuhi ketentuan ini, termasuk produk tanpa label Bahasa Indonesia. Jika ditemukan pelanggaran, dinas dapat memberikan sanksi administratif hingga pelarangan penjualan produk tersebut.

Dalam teori wewenang ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan kewenangan resmi dari negara melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan mengawasi produk yang beredar di pasaran, termasuk memastikan bahwa produk impor mematuhi ketentuan pencantuman label berbahasa Indonesia. Wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatur dalam aturan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berbagai peraturan teknis lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki kewenangan normatif untuk melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran pencantuman label.

Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Ketentuan label Bahasa Indonesia pada produk impor adalah salah satu cara untuk memenuhi hak ini, memastikan bahwa konsumen bisa memahami kandungan, kegunaan, dan instruksi penggunaan suatu produk. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertindak sebagai penjaga kepentingan publik dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang tidak mematuhi aturan sebagai perlindungan konsumen mendukung tindakan pelarangan produk tanpa label berbahasa Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi risiko kesalahan penggunaan produk atau penipuan informasi yang bisa merugikan konsumen.

Dalam teori kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki dasar kewenangan yang sah dalam melarang dan menindak produk impor tanpa

label bahasa Indonesia. Berdasarkan teori hukum kewenangan, tindakan ini didukung oleh aturan hukum yang jelas, prinsip hukum administrasi yang mewajibkan penggunaan label dalam Bahasa Indonesia, serta menjamin hak-hak konsumen terhadap informasi yang jelas dan transparan. Tindakan tersebut sebagai bagian dari peran negara dalam melindungi kepentingan umum, terutama dalam peredaran produk makanan yang didominasi oleh produk-produk impor, serta sebagai bentuk penerapan kewenangan administratif yang sah dan sesuai hukum.

Wewenang Disperindag berasal dari mandat yang diberikan oleh hukum dan peraturan. Dalam hal ini, peraturan tentang pelabelan produk impor memberikan wewenang kepada Disperindag untuk mengawasi dan menegakkan peraturan tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya, Disperindag dapat menggunakan kewenangan diskresi, misalnya dalam hal memberi peringatan kepada pelaku usaha yang belum mematuhi aturan, dengan harapan mereka akan segera memperbaiki kesalahan sebelum sanksi formal diberikan. Kewenangan Disperindag dapat bersifat delegatif, di mana sebagian wewenangnya dapat didelegasikan kepada instansi yang lebih kecil di tingkat daerah atau kepada lembaga terkait lainnya, seperti BPOM.

Pembinaan terhadap pencantuman label bahasa Indonesia dilakukan oleh menteri yang mendelegasikan pembinaan pengawasan yang menangani pada bidang perlindungan konsumen yang bekerjasama dengan BPOM, pelaksanaan pembinaan yang dimaksud dapat dilakukan oleh direktur jenderal yang menangani bidang tersebut secara sendiri maupun kerjasama dengan instansi pusat maupun daerah, peran dinas perdagangan dan perindustrian provinsi dalam segi pengawasan ikut mengawasi dan ikut memeriksa produk

yang hanya memberikan rekomendasi bukan sanksi jika memang ada makanan impor tanpa label bahasa Indonesia yang lolos atau yang sudah di distribusikan.

Bedasarkan wawancara bersama informan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Anggota Bagian Penyusun Laporan Tahunan bapak Sarino memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pada dua tahap yaitu pengawasan sebelum produk beredar dan berwenang melakukan evaluasi dan registrasi terhadap produk makanan impor sebelum diperjualbelikan di Indonesia. Salah satu syarat penting dalam registrasi produk impor adalah kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia yang memberikan informasi jelas mengenai komposisi, kandungan gizi, cara penggunaan, dan tanggal kedaluwarsa. Produk yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak akan mendapatkan izin edar. Selanjutnya pengawasan setelah produk beredar yaitu berwenang melakukan pengawasan secara rutin terhadap produk yang telah beredar di pasaran serta dapat melakukan inspeksi dan uji sampel untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk ketentuan mengenai label Bahasa Indonesia.⁶⁷

Bedasarkan teori kewenangan terkait dengan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menangani pelanggaran produk impor tanpa label Bahasa Indonesia dapat dilihat melalui berbagai pendekatan teoritis dalam hukum administrasi dan kewenangan negara. Wewenang BPOM dalam hal ini didasarkan pada aturan-aturan yang diberikan oleh negara, yang mencakup pengawasan, penegakan hukum, dan pelaksanaan administratif. Setiap badan pemerintah, termasuk BPOM, memiliki kewenangan yang sah

⁶⁷ Wawancara Anggota Bagian Penyusun Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi, Sarino, Tanggal 13 November 2023.

yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini diberikan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan terhadap produk yang beredar di masyarakat. Dalam konteks pengawasan produk impor tanpa label Bahasa Indonesia, BPOM memiliki otoritas legal berdasarkan sejumlah regulasi, seperti:

- a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
- b. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM, dan
- c. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Wewenang BPOM untuk menindak produk impor yang melanggar aturan pencantuman label Bahasa Indonesia harus berlandaskan pada ketentuan yang jelas dalam hukum. Produk impor yang tidak mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dianggap melanggar aturan, khususnya yang diatur dalam:

- a. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang mengharuskan setiap produk yang diedarkan di Indonesia mencantumkan label dengan informasi yang dapat dipahami oleh konsumen, termasuk menggunakan Bahasa Indonesia.
- b. Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, yang mewajibkan label berbahasa Indonesia untuk produk pangan olahan, baik lokal maupun impor.

BPOM memiliki wewenang dan peran administratif dalam menjalankan tugas pengawasannya, terutama dalam situasi yang memerlukan penilaian mengenai tingkat pelanggaran atau risiko yang ditimbulkan oleh produk yang tidak memenuhi syarat, seperti produk tanpa label Bahasa Indonesia.

BPOM sebagai lembaga pengawas memiliki mandat untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar di pasar sesuai dengan standar keamanan

dan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wewenang BPOM berasal dari peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat kepada lembaga ini untuk mengawasi peredaran produk pangan dan obat-obatan. Dalam konteks produk impor tanpa label bahasa Indonesia, BPOM berwenang untuk melakukan pengawasan, inspeksi, serta penegakan hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, terutama dalam situasi di mana peraturan belum jelas atau ketika penanganan cepat diperlukan. Misalnya, dalam kasus produk impor yang belum memenuhi persyaratan label bahasa Indonesia, BPOM dapat memberikan peringatan atau menarik produk dari pasar hingga syarat-syarat terpenuhi. BPOM memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan peredaran produk makanan impor melalui pengujian produk, inspeksi label, serta analisis keamanan. Fungsi pengaturan ini meliputi penyusunan aturan teknis dan standar yang harus diikuti oleh importir dan produsen dalam hal pelabelan. BPOM melakukan pengawasan secara langsung terhadap produk makanan impor yang beredar di pasar. Ini mencakup pemeriksaan label, komposisi, dan keamanannya. Jika ditemukan produk tanpa label bahasa Indonesia, BPOM dapat melakukan tindakan administratif, seperti penarikan produk dari pasar atau pengenaan sanksi. BPOM memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua produk pangan impor telah didaftarkan dan memperoleh izin edar sebelum dipasarkan. Proses ini termasuk verifikasi kepatuhan terhadap aturan pelabelan, yang mewajibkan adanya informasi dalam bahasa Indonesia pada kemasan produk.

Selain pengawasan, BPOM juga berfungsi sebagai lembaga edukasi.

BPOM sering memberikan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen serta produsen/importir mengenai pentingnya label yang informatif dan memenuhi standar bahasa Indonesia, demi keamanan dan kepastian informasi bagi konsumen. BPOM bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bea Cukai untuk mengontrol masuknya produk impor dan memastikan kepatuhan pada peraturan pelabelan. Wewenang BPOM dalam mengawasi produk impor tanpa label bahasa Indonesia adalah perlindungan konsumen. Label yang jelas dalam bahasa Indonesia membantu konsumen memahami komposisi produk, cara penggunaan, dan tanggal kedaluwarsa, yang sangat penting untuk produk pangan. Tanpa label yang memadai, konsumen tidak memiliki informasi cukup untuk membuat keputusan yang tepat, dan ini dapat membahayakan kesehatan mereka. Jika ditemukan produk makanan impor yang tidak memiliki label dalam bahasa Indonesia, BPOM dapat memberikan sanksi berupa penarikan produk dari pasar, denda administratif, atau bahkan pencabutan izin edar produk tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan importir terhadap peraturan dan melindungi konsumen.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BPOM adalah masuknya produk impor melalui jalur distribusi informal atau e-commerce yang sulit diawasi secara langsung. Oleh karena itu, BPOM harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memperkuat pengawasan digital serta kerja sama lintas lembaga untuk menangani peredaran produk yang tidak memenuhi standar. Wewenang BPOM merupakan wewenang yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang memberikan legitimasi untuk bertindak. Kewenangan ini melibatkan proses pengaturan, pengawasan, dan penegakan

hukum. BPOM harus memastikan adanya kepastian hukum dalam pelabelan produk. Kewajiban pelabelan dengan bahasa Indonesia tidak hanya merupakan bentuk regulasi teknis, tetapi juga bagian dari kepastian hukum yang melindungi hak-hak konsumen.

B. Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha yang Mengedarkan Produk Makanan Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia di Provinsi Jambi

Bedasarkan wawancara dengan informan yaitu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Kepala Bagian Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian ibu Ana sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan impor tanpa label bahasa Indonesia di Provinsi Jambi berupa peringatan terlebih dahulu kemudian jika pelaku masih melanggar maka akan di beri tindakan berupa penyitaan barang dan sanksi yaitu denda administratif dan penyabutan izin usaha.⁶⁸

Bedasarkan teori pengawasan mengenai penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan impor tanpa label bahasa Indonesia di Provinsi Jambi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertindak sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi peredaran produk pangan guna melindungi konsumen dan menjaga kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan. Teori pengawasan menekankan bahwa setiap badan pemerintah yang diberi kewenangan untuk

⁶⁸ Wawancara Kepala Bagian Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Ana, Tanggal 9 Oktober 2023

mengatur memiliki peran untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang ditetapkan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam hal ini, bertugas untuk mengawasi produk pangan impor, memastikan bahwa produk-produk tersebut sesuai dengan standar keamanan pangan, serta memenuhi kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia.

Produk makanan impor yang tidak mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dianggap melanggar aturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pengawasan dilakukan sebelum produk mendapatkan izin edar untuk memastikan produk memenuhi seluruh persyaratan, termasuk pencantuman label Bahasa Indonesia dan pengawasan setelah produk beredar di pasar. Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia pada Barang menyatakan “Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia”. Peraturan ini menegaskan kewajiban pelabelan dalam Bahasa Indonesia untuk barang-barang tertentu, termasuk makanan impor. Sanksi administratif dapat diberikan kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban ini, seperti teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan perdagangan, hingga pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif sebagai upaya preventif untuk mendorong pelaku usaha agar mematuhi peraturan, termasuk kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia. Kewenangan ini harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, di mana semua tindakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus berdasarkan aturan yang jelas dan sah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

lebih menekankan pada upaya pencegahan dan perbaikan. Denda administratif diterapkan jika pelanggaran berlanjut atau pelaku usaha gagal mematuhi peringatan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerapkan sanksi administratif untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia. Penerapan sanksi administratif bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku usaha yang tidak patuh. Misalnya, dengan memberi sanksi berupa denda atau penangguhan izin edar, berharap pelaku usaha akan segera mematuhi aturan yang berlaku. Teori ini juga menganggap penting peran pengawasan yang berkelanjutan agar pelaku usaha terus berada dalam jalur yang benar dan mematuhi regulasi yang ada.

Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran label berbahasa Indonesia juga kewajiban untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menyebabkan konsumen tidak dapat memahami informasi penting tentang produk, seperti bahan kandungan, cara penggunaan, atau tanggal kedaluwarsa. Sanksi administratif yang dikenakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk melindungi hak konsumen agar mereka mendapatkan informasi yang mudah dipahami dan dapat membuat keputusan yang tepat terkait produk yang mereka beli.

Pengawasan merupakan fungsi penting dalam administrasi publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, termasuk Disperindag, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk menjaga ketertiban, memastikan perlindungan konsumen, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Disperindag memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sejak awal guna mencegah peredaran produk yang melanggar peraturan, seperti makanan impor tanpa label bahasa Indonesia. Sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha dilakukan agar mereka memahami kewajiban pelabelan produk yang sesuai dengan regulasi nasional. Ketika terjadi pelanggaran, seperti produk yang beredar tanpa label bahasa Indonesia, Disperindag bertindak secara represif dengan memberikan sanksi administratif. Pengawasan represif berfokus pada tindakan korektif terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan.

Pengawasan yang dilakukan dengan menerapkan sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar tidak mengulangi pelanggaran dan untuk mencegah pelanggaran oleh pelaku usaha lainnya.

Disperindag memiliki wewenang yang diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang memberikan mandat untuk melakukan pengawasan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran, termasuk terkait pelabelan produk impor. Beberapa regulasi penting yang mendasari wewenang Disperindag yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Undang-undang ini mewajibkan produk yang beredar di Indonesia, termasuk impor, untuk mencantumkan label dalam bahasa Indonesia. Pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan ini dapat dikenai sanksi administratif oleh Disperindag sebagai bagian dari upaya melindungi konsumen. Peraturan Menteri Perdagangan No.73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang: Peraturan ini secara spesifik mengatur bahwa produk impor harus mencantumkan label bahasa Indonesia, dan Disperindag

bertanggung jawab mengawasi implementasinya di pasar lokal. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan: PP ini juga memperkuat kewajiban pelabelan dalam bahasa Indonesia untuk semua produk makanan yang dipasarkan di Indonesia, termasuk produk impor.

Berdasarkan aturan tersebut, Disperindag berperan penting dalam pengawasan pasar dan memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan melalui penerapan sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan bagian dari hukum administratif yang bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan tanpa harus melalui proses pengadilan. Sanksi ini bersifat langsung dan diberikan oleh otoritas administratif seperti Disperindag. Menurut teori hukum administratif, penerapan sanksi administratif. Langkah awal yang dilakukan oleh Disperindag sering kali berupa teguran atau peringatan kepada pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan impor tanpa label bahasa Indonesia. Teguran ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran dan mematuhi aturan yang berlaku.

Denda Administratif jika peringatan tidak diindahkan atau pelanggaran dianggap serius, Disperindag berwenang memberikan denda administratif. Denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha, serta menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain agar mematuhi peraturan pelabelan. Disperindag dapat memerintahkan penarikan produk dari pasar jika produk tersebut tidak mematuhi ketentuan pelabelan. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak jelas informasinya, termasuk risiko kesehatan yang mungkin timbul dari ketidakmampuan memahami informasi produk karena tidak ada label dalam bahasa Indonesia.

Dalam kasus pelanggaran berat atau berulang, Disperindag dapat merekomendasikan pencabutan izin usaha kepada pelaku usaha yang tetap mengabaikan peraturan. Sanksi ini dianggap sebagai tindakan terakhir untuk menegakkan aturan secara lebih tegas. Wewenang Disperindag untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan dapat dianalisis melalui beberapa perspektif teori kewenangan. Wewenang Disperindag untuk memberikan sanksi administratif harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah. Dalam kasus pelanggaran pelabelan, wewenang ini bersumber dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan Menteri Perdagangan yang mewajibkan pencantuman label bahasa Indonesia pada produk impor. Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan administratif yang dilakukan Disperindag.

Disperindag memiliki ruang untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam memilih jenis sanksi administratif yang paling tepat berdasarkan situasi dan tingkat pelanggaran. Misalnya, jika pelanggaran dianggap ringan, Disperindag dapat memilih untuk memberikan teguran terlebih dahulu. Namun, dalam kasus pelanggaran serius atau berulang, mereka dapat langsung memberikan denda atau memerintahkan penarikan produk dari pasar. Penerapan sanksi administratif sangat penting untuk menciptakan keadilan bagi pelaku usaha dan memastikan perlindungan konsumen. Penerapan sanksi yang konsisten dan jelas membantu memastikan bahwa semua pelaku usaha memahami risiko dari ketidakpatuhan terhadap aturan dan tidak ada ruang untuk interpretasi yang berbeda mengenai konsekuensi pelanggaran.

Agar sanksi administratif yang diterapkan oleh Disperindag efektif, beberapa faktor dalam Penerapan sanksi administratif bertujuan meningkatkan

kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Jika sanksi diterapkan secara konsisten dan tegas, pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan pelabelan produk, termasuk kewajiban mencantumkan label bahasa Indonesia. Sanksi administratif seperti denda dan penarikan produk dari pasar bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. Hal ini penting agar pelaku usaha tidak mengulangi pelanggaran di masa mendatang dan pelanggaran serupa dapat dicegah. Efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi oleh Disperindag juga harus dilihat dari perspektif perlindungan konsumen. Produk tanpa label bahasa Indonesia dapat membahayakan konsumen karena mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang komposisi, tanggal kedaluwarsa, atau instruksi penggunaan produk. Penerapan sanksi membantu memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman dan memberikan informasi yang memadai kepada konsumen. Meskipun Disperindag memiliki wewenang untuk menerapkan sanksi administratif, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa sanksi tersebut efektif.

Pengawasan Terhadap Produk Impor: Salah satu tantangan utama adalah pengawasan yang terbatas terhadap peredaran produk impor, terutama yang masuk melalui jalur distribusi informal atau e-commerce. Hal ini menyulitkan Disperindag untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan mendeteksi pelanggaran sejak awal. Pengawasan produk impor sering kali melibatkan kerja sama antara beberapa lembaga, seperti BPOM, Bea Cukai, dan Kementerian Perdagangan. Tantangan dalam koordinasi antar lembaga dapat memperlambat atau menghambat penerapan sanksi administratif yang cepat dan tepat.